

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Politik merupakan suatu usaha untuk mencapai atau mewujudkan cita-cita atau ideologi. Kata politik sering menimbulkan perasaan yang mengembirakan tetapi disamping itu juga menimbulkan asosiasi yang tidak mengembirakan. Kemerdekaan Indonesia adalah suatu kabar perasaan gembira sedangkan asosiasi yang tidak mengembirakan, adanya pertentangan-pertentangan politik yang mengakibatkan kerugian yang tidak sedikit, kejahatan-kejahatan politik dan lain sebagainya. Politik ialah hal yang ada hubungannya dengan kekuasaan. (Soelistyati Ismail Gani,1987:12)

Perkembangan politik di Indonesia di tandai dengan proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yang mana Indonesia telah menaruh kehidupan politiknya dalam genggam tangan sendiri. Sejak itulah Indonesia menentukan sendiri corak kehidupan dan hakekat kehidupan politiknya. Pada November 1945 dikeluarkannya maklumat yang menganjurkan diadakan pembentukan partai-partai politik yang menandakan kemajuan kehidupan politik Indonesia. Hal ini berakibat kehidupan dan kegiatan politik di Indonesia semakin hari semakin maju dan disusul pula dengan semakin

banyaknya warga negara Indonesia yang turut aktif mengambil bagian dalam kanca percaturan politik.

Kemajuan dalam bidang praktek politik dapat ditunjukkan dengan adanya partai-partai politik yang menjadi bagian yang mutlak dari pada kehidupan dan aktivitas politik; tumbuh dengan subur. Demikian juga dengan adanya Pemilihan Umum yang pertama kali diadakan pada tahun 1955, kemudian disusul dengan Pemilihan Umum yang kedua pada tahun 1971 dan Pemilihan Umum ketiga pada tanggal 2 Mei 1977, serta Pemilihan Umum keempat tanggal 4 Mei 1982 (Soelistyati Ismail Gani,1987:16). Secara teoritikal, makin banyak partai politik memberikan kemungkinan yang lebih luas bagi rakyat untuk menyalurkan aspirasinya dan meraih peluang untuk memperjuangkan hak-haknya serta menyumbangkan kewajibannya sebagai warga negara.

Dalam sistem politik Indonesia telah menempatkan Partai Politik sebagai pilar utama penyangga demokrasi. Artinya, tak ada demokrasi tanpa Partai Politik. Karena begitu pentingnya peran Partai Politik, maka sudah selayaknya jika diperlukan sebuah peraturan perundang-undangan mengenai Partai Politik. Peraturan perundang-undangan ini diharapkan mampu menjamin pertumbuhan Partai Politik yang baik, sehat, efektif dan fungsional.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial. memiliki *platform* atau haluan politik tersendiri.

mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.

Daerah Istimewa Yogyakarta terdiri dari 4 Kabupaten dan 1 Kota yaitu Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul, Kabupaten Kulunprogo, Kabupaten Gunung Kidul dan Kota Yogyakarta. Dari 4 Kabupaten dan 1 kota tersebut di pimpin oleh masing-masing Kepala Daerah yang dipilih melalui sistem demokrasi atau pemilihan umum.

Kabupaten Bantul tetrdiri dari 17 kecamatan, 75 desa, 933 dusun dan jumlah penduduknya 919.440 jiwa. Perkembangan politik di Kabupaten Bantul ditandai dengan banyaknya partai politik yang mengikuti kompetisi dalam Pilkada, begitupun tingkat partisipasi masyarakat dalam merayakan pesta demokrasi.

PDI-P merupakan partai yang memiliki basis masa besar di Daerah Istimewa Yogyakarta. Dukungan masyarakat dan kader PDI-P di DIY semakin besar pasca runtuhnya orde baru. Hal ini dapat terlihat dari kursi keuasaan kepala daerah yang di dominasi oleh PDI-P sejak tahun 1999. Dalam profil PDI-P disebutkan bahwa sejak tahun 1999 hingga tahun 2009, PDI-P senantiasa mendapatkan suara tertinggi dalam pemilu di DIY. Partai tersebut hampir selalu menjadi pemenang dalam setiap pemilu yang diselenggarakan di wilayah DIY. Hal ini juga terjadi di Kabupaten Bantul, dimana dari tahun 1999 sampai 2015 ini dipimpin oleh kepala daerah yang

Idham Samawi tercatat sebagai Bupati Bantul dari tahun 1999-2010, dan istrinya menjabat setelahnya dari 2010-2015. Kondisi ini membuktikan kekuatan PDI-P di DIY khususnya Kabupaten Bantul. Keberhasilan PDI-P dalam menduduki kursi kekuasaan selama beberapa periode ini tidak terlepas dari peran PDI Perjuangan ataupun strategi untuk para calon kepala daerah.

Keberhasilan PDI-P dalam melakukan pembentukan citra selama masa kampanye politik merupakan wujud dari kerja keras seluruh anggota PDI Perjuangan itu sendiri. Pada dasarnya Partai politik memiliki fungsi. Ada empat fungsi partai politik menurut Mariam Budiarjo (2010) yaitu komunikasi politik, sosialisasi politik, rekrutmen politik dan pengelolaan konflik. Fungsi Partai Politik seperti inilah yang kemudian digunakan oleh PDI-P dalam membangun citra kadernya dimata masyarakat.

Pada 9 Desember 2015 telah diselenggarakan pemilihan kepala daerah Kabupaten Bantul. Terdapat dua calon Bupati dan wakil Bupati yang telah lulus verifikasi dan berhak mengikuti persaingan untuk mendapatkan kursi sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah, yaitu Ida-Munir yang diusung oleh parta PDI-P dan Nasdem, dan pasangan Suharsono dan Abdul Halim diusung oleh Gerindra-PKB yang juga berkoalisi dengan Demokrat dan PKS (Azizah dan Waskita, 2015).

Hasil rekapitulasi suara Pemilihan Kepala Daerah secara resmi yang dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bantul memenangkan pasangan calon dengan nomor urut satu yaitu Suharsono-Abdul Halim

Muslih dengan memperoleh 261.412 suara atau 52.80% dari total suara sah. Sedangkan pasangan calon nomor urut dua Sri Surya Widati-Misbakhul Munir memperoleh 233.677 suara atau 47.2% (KPU Divisi Teknis Penyelenggaraan pemilu, Arief Widayanto).

Kemenangan pasangan Suharsono dan Abdul halim ini, cukup mengejutkan bagi PDI Perjuangan khususnya cabang Bantul, sebab PDI Perjuangan sebagai partai basis di bantul kalah atas lawannya.

Kekalahan tersebut pada akhirnya memberikan banyak tanda tanya. Dengan banyaknya pertanyaan yang muncul PDI Perjuangan merasakan guncangan besar atas kekalahan tersebut, kegagalan PDI-P di Kabupaten Bantul ini pada akhirnya juga menjadi pukulan sekaligus pembelajaran yang sangat besar bagi PDI Perjuangan itu sendiri. Dari realita politik yang terjadi pada pemilihan umum ini, penulis bermaksud meneliti **Strategi Partai Politik dalam PILKADA (Studi Kasus : Kegagalan PDI Perjuangan dalam Pemilukada di Kabupaten Bantul 2015)**.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka penyusun dapat merumuskna pokok permasalahan yaitu :

1. Bagaimana Strategi PDIPerjuangan dalam Pemilukada di Kabupaten Bantul

2. Kenapa PDIPerjuangan gagal dalam pemilukada di Kabupaten Bantul pada tahun 2015 ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mengetahui strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalam Pemilukada di Kabupaten Bantul 2015.
2. Mengidentifikasi kegagalannyaPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan dalaam Pemilukada di Kabupaten Bantul 2015.

D. Manfaat Penelitian

Sebagaimana identifikasi masalah dan tujuan yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini memiliki manfaat secara teori dan peraktis.

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan tentang peran partai politik dan strategi dalam praktek politik, khususnya peran dan strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dibagi menjadi dua hal :
 - a. Manfaat bagi peneliti yakni menambah wawasan, pengetahuan dan pengalaman peneliti tentang peran dan strategi partai politik dalam pemilihan kepala daerah, serta dapat mengaplikasikan teori – teori yang diperoleh selama masa kuliah ke dalam dunia kerja.

b. Manfaat bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yakni dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan dan menjadi kritik membangun agar tidak terjadi kegagalan yang sama dalam pesta politik berikutnya. Hal-hal penting yang dapat diambil sebagai salah satu jembatan untuk terus memperbaiki kinerja partai politik, khususnya Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan kabupaten Bantul.

E. Kerangka Dasar Teori

1. Pengertian Partai Politik

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, memiliki *platform* atau haluan politik tersendiri, menghusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.

Secara khusus pengertian partai politik disebutkan dalam UU RI No. 31 Thn 2002 mengenai partai politik, yaitu pengertian partai politik merupakan organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita, untuk dapat memperjuangkan kepentingan anggota, kepentingan masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.

Adapun beberapa ilmuwan mendefinisikan partai politik sebagai berikut:

1. R.H. Soltau.

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir, dimana bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan bertujuan untuk menguasai pemerintahan serta melaksanakan kebijakan umum organisasi.

2. Carl J. Friedrich.

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan itu, memberikan kepada anggota-anggota partainya kemanfaatan yang bersifat *idiil* maupun materil.

3. Miriam Budiarjo

Partai politik adalah suatu kelompok terorganisir dimana anggotanya mempunyai oriantasi, cita-cita dan nilai-nilai yang sama. Tujuan kelompok ini yaitu memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakannya (Indra Bastian, 2007)

Jadi yang dimaksud dengan partai politik dalam penelitian ini adalah suatu kelompok yang beranggotakan berbagai golongan yang mempunyai

pandangan ide, serta cita-cita yang sama dan harus diperjuangkan serta mempunyai tujuan untuk memperoleh kekuasaan.

a. Fungsi Partai Politik

Menurut Miriam Budiarmo partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu. Partai politik juga memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Komunikasi Politik

Dalam menjalankan fungsi sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperintah. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, partai politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.

2. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya

menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai

warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

3. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjangkau dan melatih calon-calon kader.

4. Pengatur konflik

Sebagai sarana pengatur konflik, potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, budaya, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik (Miriam Bidiardjo,2010:405-410).

b. Tugas partai politik

Dalam Negara yang berpaham demokrasi, di mana masyarakatnya merupakan masyarakat heterogen, partai politik mempunyai beberapa tugas, di antaranya yaitu :

1. Tugas pokok partai politik yaitu menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Partai politik disini bertugas untuk

menampung semua pendapat dan keinginan rakyat atau khalayak, kemudian langkah selanjutnya memilih dan merumuskan serta menyerahkan kepada pemerintah untuk dapat dijadikan politik yang akan diperjuangkan semaksimal mungkin.

2. Partai politik juga mempunyai tugas untuk menyebarluaskan gagasan atau ide-ide tersimpul didalam rencana kebijakan pemerintah.
3. Partai politik mempunyai tugas mendidik para warga Negara menjadi orang yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai mahluk sosial.
4. Partai politik mempunyai tugas untuk menumbuhkan dan memupuk kesadaran akan loyalitas nasional.
5. partai politik bertugas untuk mengatur pertikaian dan membantu merumuskan konflik-konflik dan selanjutnya berusaha mengatasi konflik tersebut serta mencari penyelesaiannya (Sulistiati Ismail Gani, 1987:113-114)

c. Peran Partai Politik

Pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, atau sering disebut Pilkada, merupakan perkara wajib yang harus dilaksanakan setelah periode untuk menjabat habis sebagaimana dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Disebutkan juga dalam pasal 65 ayat (3) UU No.32 tahun 2004, bahwa tahap pelaksanaan pemilihan kepala daerah meliputi: (a) pendaftaran daftar pemilih, (b) pendaftaran dan penetapan calon kepala daerah/wakil kepala daerah, (c) kampanye, (d) pemungutan suara, (e) penghitungan suara, dan (f) penetapan pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Demikian juga dengan keberadaan partai politik (partai politik) di Kabupaten/Kota sebagai pilar bagi tegaknya sistem demokrasi partai politik juga memiliki peran dan andil yang cukup besar bagi pelaksanaan dan kelancaran proses pemilihan kepala daerah sebagaimana yang tertuang dalam pasal 65 ayat (3) UU No. 32 tahun 2004 tersebut. Baik itu peran yang berbaur sosialisasi, pendidikan terhadap masyarakat, persaingan atau kompetisi dari pada kader terbaiknya, hingga pada evaluasi terhadap pelaksanaan pemilihan. Semua itu tidak bisa di lepaskan dari potret partai politik.

Sebagaimana yang telah diamanatkan oleh UU No.32 tahun 2004 pasal 59 ayat (1), bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara berpasangan oleh partai politik atau gabungan partai politik.

Dengan demikian, partai politik telah mendapat kewenangan penuh sebagai pintu atau bahkan kendaraan bagi tiap-tiap

pasangan calon yang akan maju berkompetisi dalam merebutkan jabatan kepala daerah. Dan tidak ada pilihan lain bagi putra-putri daerah maupun kader partai untuk tidak memakai partai sebagai persyaratan utama untuk maju sebagai calon kepala daerah. Sehingga partai politik sebagai aktor yang di percaya dalam menyaring bakal calon dari tiap-tiap pasangan, harus mempunyai mekanisme internal partai yang selektif dalam melakukan penjarigan bakal calon.

Pada perinsipnya, proses penjarigan terdiri dari tiga tahap, yaitu :

- a. Tahap Persiapan, yaitu di lakukan tahap kegiatan: pertama, diadakan rapat pleno yang diperluas dari para pengurus partai. Kedua, diadakan rapat pleno yang di perluas oleh DPD/DPC Partai dengan partai atau fraksi manakah DPD/DPC akan menetapkan kemungkinan-kemungkinan untuk bekerja sama atau berkoalisi sebagai langkah strategis dalam memenagkan pilkada.
- b. Tahap Rekrutmen, yaitu proses rekrutmen dalam menyaring para calon terbaik yang akan dicalonkan sebagai calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dari partai politik dilakukan dengan langkah kegiatan sebagai berikut. Pertama, DPD/DPC Partai mengumumkan adanya pembukaan pendaftaran bagi

para putra-putri terbaik daerah yang berkeinginan untuk maju sebagai calon kepala daerah. Kedua, setelah waktu pendaftaran yang disediakan ditutup, maka DPD/DPC partai melakukan penerimaan formulir pendaftaran dari masing-masing pasangan bakal calon dan melakukan verifikasi berkas-berkas yang disyaratkan, yaitu meliputi: kelengkapan administrasi dan surat dukungan dari DPD partai.

- c. Tahap Penetapan Pasangan Calon, yang dimaksud dengan tahap penetapan pasangan calon kepala daerah dilakukan beberapa proses penilaian yang meliputi: seleksi internal, uji publik, penyampaian bakal calon kepada DPD partai dan penyampaian calon kepada KPU sebagai calon kepala daerah.

Adapun implikasi dari peran partai politik dalam pilkada yaitu :

1. Implikasi Positif

Implikasi positif adalah suatu bentuk akibat yang memberikan dampak kemajuan, kelancaran bagi pelaksanaan pilkada di kabupaten atau kota dari adanya peran partai politik.

Implikasi positif itu diantaranya adalah:

- a. Seperti yang tertuang dalam UU No. 32 tahun 2004 pasal 59 ayat (1), bahwa peserta pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah adalah pasangan calon yang diusulkan secara bernaungan oleh partai politik atau gaungan partai politik.

Berdasarkan asumsi positif peran parpol dalam pelaksanaan pilkada, dapat dijelaskan bahwa dengan adanya peran partai tersebut, para pasangan calon dapat bersaing dalam memperebutkan posisi sebagai kepala daerah. Dengan demikian, selain sebagai pintu masuk pasangan calon juga dapat menjadi kendaraan bagi masing-masing calon agar dapat mudah dalam memenuhi segala persyaratan sebagai calon kepala daerah yang telah ditetapkan undang-undang. Jadi partai mempunyai peranan yang berarti dalam mengantarkan para putra putri daerah dalam memperubtkan kursi kepemimpinan menuju jabatan sebagai kepala daerah.

- b. Dengan adanya kewenangan partai yang diberikan oleh UU No. 32 tahun 2004 khususnya tentang pemilihan kepala daerah tersebut, partai harus berupaya membuat sebuah mekanisme internal partai dalam merekrut kader terbaiknya atau para putra-putri daerah untuk diusung sebagai calon kepala daerah. Dengan demikian partai politik yang ada berperan sebagai mesin penjaring atau penyeleksi dalam mencetak para pemimpin daerah, yang akan ditawarkan kepada masyarakat untuk dijadikan sebagai pemimpinnya. Jadi bagi para pemilih, dengan adanya mekanisme parpol tersebut, rakyat telah disediakan para calon terbaik daerah sebagai hasil kualifikasi masing-masing parpol.

- c. Partai yang ada, juga berperan sebagai perpanjangan tangan dari KPU Kabupaten atau Kota sebagai penyelenggara pilkada. Dalam hal ini yang biasa dilakukan oleh partai adalah turut mensosialisasikan tata cara pemilihan pemilihan (pencoblosan) kepada para anggota partai ataupun masyarakat secara umum, sehingga masyarakat akan diberitahu bagaimana mengikuti tata cara pemilihan yang baik dan benar. Selain itu partai partai yang mengusung calon dalam pilkada juga berupaya dalam mensosialisasikan (memperkenalkan) para calon kepala daerah melalui media kampanye agar lebih dikenal masyarakat.
- d. Partai juga berfungsi sebagai pengatur konflik, terutama dikalangan massa pendukung masing-masing calon. Dalam proses pemilihan di kabupaten atau kota, partai politik yang mengusung pasangan calon kepala daerah, telah menekankan kepada pasangan calon yang diusungnya untuk menerapkan prinsip “kampanye damai” dalam setiap kesempatan yang diberikan oleh KPU. Hal inilah yang mampu mendorong terciptanya keadaan aman dan lancar dalam proses pemilihan kepala daerah di kabupaten/kota.
- e. Partai politik juga berhak mengawasi jalannya pemilihan hingga pada proses akhir penghitungan suara, yaitu dengan mengirimkan beberapa kader sebagai saksi ataupun pemantau

dalam proses pemilihan. Sehingga dengan adanya mekanisme kontrol dari masing-masing pihak (KPU, Partai maupun pasangan calon, dan tokoh masyarakat), berbagai kecurangan atau pelanggaran dapat ditekan semaksimal mungkin.

2. Implikasi Negatif

Selain implikasi positif yang ditimbulkan dalam peran partai politik tersebut ternyata keberadaan partai dalam pemilihan kepala daerah kabupaten atau kota juga membawa implikasi negatif, yaitu:

- a. Dalam melakukan rekrutmen calon kepala daerah, partai politik yang ada di kabupaten/kota masih selalu mengandalkan campur tangan (intervensi) dari partai di tingkat pusat (DPD). Meskipun proses penjurian calon dilakukan oleh lokal (kabupaten/kota) akan tetapi keputusan akhir berada ditangan pusat (DPD). Hal seperti inilah yang sering menimbulkan ekses negatif, yaitu konflik antara wilayah pusat dan daerah, sehingga calon yang diajukan sering tidak sesuai dengan keinginan rakyat.
- b. Dari banyaknya massa partai, pada saat kampanye masing-masing pasangan calon partai sering sekali tidak mampu mengkoordinir atau mengelola massanya untuk berkampanye

secara tertib dan aman sehingga yang timbul adalah pelanggaran-pelanggaran dalam lalu lintas, mengganggu ketenangan masyarakat, dan pelanggaran lainnya yang seharusnya tidak perlu terjadi pada masa kampanye.

2. Strategi Partai Politik

Strategi, menurut Arnold Stenberg, adalah rencana untuk tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Sementara bagi Carl Von Clausewitz, perbedaan antara taktik dan strategi, sebagai berikut:

Taktik adalah seni menggunakan “kekuatan bersenjata” dalam pertempuran untuk memenangkan peperangan dan bertujuan mencapai perdamaian. Rencana jangka tersebut kita sebut strategi. Dalam strategi ini, tujuan-tujuan jangka pendek dicapai melalui taktik. Namun tanpa strategi, taktik tidak ada gunanya.

Strategi adalah rencana untuk tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya. Dalam memilih, menurut Peter Schroder, pola dasar strategi yang diperlukan harus kita kenali agar kita dapat menetapkan pilihan yang tepat. Dalam setiap pola dasar, ada sederetan strategi tunggal, yang dimana pilihan khusus mengenai kerangka persyaratan tergantung pada citra yang diinginkan dan tujuan-tujuan organisasi.

Pada dasarnya strategi dibagi menjadi strategi ofensif (menyerang) dan strategi defensif (bertahan). Strategi ofensif dibagi menjadi strategi untuk memperluas pasar dan strategi untuk menebus pasar.

1. Strategi Ofensif (menyerang)

Strategi Ofensif selalu dibutuhkan, misalnya apabila partai ingin meningkatkan jumlah pemilihnya atau apabila pihak eksekutif ingin mengimplementasikan sebuah proyek. Dalam kedua kasus tersebut harus ada lebih banyak orang yang memiliki pandangan positif terhadap partai atau proyek tersebut, sehingga kampanye berhasil. Yang dimaksud strategi ofensif adalah strategi untuk memperluas pasar dan strategi untuk menebus pasar. Pada dasarnya, semua strategi ofensif yang diterapkan saat kampanye pemilu harus perbedaan yang jelas dan menarik antara kita dan partai-partai pesaing yang ingin kita ambil alih pemilihannya. Dalam strategi ofensif yang digunakan untuk mengimplementasikan politik, yang harus dijual atau di tampilkan adalah perbedaan terhadap keadaan yang berlaku saat itu serta keuntungan-keuntungan yang dapat diharapkan daripadanya. Dari strategi ofensif ada dua poin yang disampaikan yaitu :

a. Strategi perluasan pasar

Menurut Peter Schroder, strategi perluasan pasar dapat dilakukan dengan dua cara yaitu *pertama* kampanye pemilu

Dalam kampanye pemilu, strategi perluasan pasar yang ofensif bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru disamping para pemilih yang telah ada. Strategi semacam ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye pengantar, untuk menjelaskan kepada publik tentang penawaran mana saja yang lebih baik, dibandingkan dengan penawaran partai-partai lainnya. *Kedua*, implementasi politik, dalam kasus ini produk baru yang ditawarkan yaitu politik baru atau lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan politik baru tersebut, perlu diiklankan.

Sebelum pelaksanaan perlu dilakukan pekerjaan kehumasan yang cukup. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, proyek tersebut sewaktu-waktu dapat didiskriminasikan. Produk atau politik yang sejak lama sudah ada dipasaran dan belum diimplementasikan secara sukses, atau bahkan gagal mengarah kepada perluasan pasar jika tetap menggunakan namanya yang lama. Produk atau politik semacam ini membutuhkan nama yang baru, deskripsi baru dari keuntungan ditawarkan, dan apabila diinginkan, juga sebuah kemasan baru yang dihubungkan dengan individu-individu baru. Pertentangan internal perlu atasi, sedapat mungkin sebelum dilakukan kampanye terbuka atas produk atau politik tersebut.

b. Strategi menembus pasar

Menurut Peter Schroder, strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini tidak aktif dengan memeberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan penggalan potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalan bagian yang dimiliki dalam kelompok target dimana keberhasilan telah diraih sebelumnya. Tujuan yang dimiliki misalnya adalah, diperolehnya hasil yang lebih baik dalam sebuah target (misalkan dahulu 30%, sekarang 50%). Hal ini menyangkut pemasaran program yang dimiliki secara lebih baik dan peningkatan itensitas keselarasan antara program dan individu, seperti halnya memperbesar tekananterhadap kelompok-kelompok target.

2. Strategi Defensif(bertahan)

Strategi defensif akan muncul kepermukaan, misalnya apabila partai pemerintah atau sebuah koalisi pemerintahan yang terdiri atas beberapa partai ingin mempertahankan mayoritasnya atau apabila pangsa pasar ingin dipertahankan. Selain itu, strategi defensif juga dapat muncul apabila sebuah pasar tidak akan dipertahankan lebih lanjut atau ingin ditutup, dan penutupan pasar ini diharapkan membawa keuntungan sebanyak mungkin. Dari strategi defensif ada dua poin yang disampaikan yaitu:

a. Strategi mempertahankan pasar.

Strategi ini adalah strategi yang khas untuk mempertahankan mayoritas pemerintah. Dalam kasus ini partai akan memelihara pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman sebelumnya terhadap situasi yang berlangsung. Terhadap partai oposisi yang menyerang, partai pemerintah akan berusaha mengaburkan perbedaan yang ada dan mereka menggunakan berbagai rincian strategi yang berbeda, seperti misalnya strategi yang disebut sebagai strategi disinformasi.

Partai yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap yang bertentangan dari partai-partai yang menerapkan strategi ofensi. Apabila yang satu ingin menonjolkan perbedaan yang ada guna memberikan penawaran yang menarik, maka partai-partai yang menerapkan strategi defensif justru ingin ada perbedaan yang ada tidak dikenali.

b. Strategi Menyerahkan pasar. Strategi ini memiliki dua arti, yang dicontohkan oleh dua kasus ini.

1. Sebuah partai ingin menyerah dan dalam situasi tertentu ingin melebur dengan partai lain. Ini tidak terlalu sering terjadi.

Yang lebih sering adalah kasus yang kedua.

2. Dalam pemilu yang menggunakan balot (Ballotage), ada tahap pemungutan suara kedua yang hanya diikuti oleh kandidat-kandidat terkuat dari pemilu tahap pertama, penyerahan pasar untuk sementara merupakan peristiwa yang sering terjadi. Sebagai contohnya, apabila dua minggu setelah pemungutan suara pertama diadakan pemungutan suara kedua, diaman pemungutan suara kedua hanya boleh diikuti dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara pertama, maka para kandidat lainnya dihadapkan pada pertanyaan: strategi apa yang diterapkan dalam 14 hari tersebut ? dalam hal ini tidak ada pasar yang dipertahankan, sebagaimana pula tidak ada strategi ofensif yang dapat dipertahankan. Namun apa bila para kandidat terpaksa menterahkan pasarnya, mereka harus mempertegas ketidak ikut sertaannya dengan memberikan alasan yang mendasar dan mengusulkan pilihan lain. Dalam usulan ini terletak suatu tugas yang dapat di manfaatkan secara strategis. Tentu saja kondisi-kondisi suatu usulan pemilu dapat di perdebatkan dengan para kandidatlainnya. Hal ini dapat mencakup masalah persetujuan politik hingga pembagian kekuasaan, dan perlu di sertai dengan kampanye informasi bagi para multiplikator.(Toni Andrianus pito dkk,

F. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah suatu usaha untuk menjelaskan tentang pembatasan pengertian antara konsep yang satu dengan yang lainnya agar tidak terjadi kesalahpahaman didalam melakukan penerapan teori pada skripsi ini.

Adapun Definisi konsepsional yang digunakan didalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Partai Politik.

Partai politik adalah sarana politik yang menjembatani elit-elit politik dalam upaya mencapai kekuasaan politik dalam suatu negara yang bercirikan mandiri dalam hal finansial, meliki *platfrom* atau haluan politik sendiri, mengusung kepentingan-kepentingan kelompok dalam urusan politik, dan turut menyumbang *political development* sebagai suprastruktur politik.

2. Fungsi Partai Politik

partai politik memiliki fungsi utama yaitu mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.

3. Strategi partai politik

Strategi partai politik adalah rencana untuk tindakan. Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya strategi pada akhirnya.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional adalah rician indikator yang berguna sebagai panduan dalam mengumpulkan data dilapangan. Dalam penelitian tentang peran dan strategi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, indikatornya adalah :

1. Fungsi Partai Politik

a. Komunikasi Politik

Dalam menjalankan fungsi sarana komunikasi politik, partai politik mempunyai peran penting sebagai penghubung antara yang memerintah dan yang diperitntah. Menurut Sigmund Neumann dalam hubungannya dengan komunikasi politik, politik merupakan perantara besar yang menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan lembaga pemerintah yang resmi dan mengaitkannya dengan politik didalam masyarakat politik yang lebih luas.

b. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik adalah upaya menciptakan citra (*image*) bahwa partai politik memperjuangkan kepentingan umum dan lebih tinggi nilainya apabila mampu mendidik anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung

jawabnya sebagai warga Negara dan menempatkan kepentingan sendiri dibawah kepentingan nasional.

c. Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik adalah seleksi kepemimpinan dan kader-kader yang berkualitas. Rekrutmen politik menjamin kontinuitas dan kelestarian partai sekaligus merupakan salah satu cara untuk menjaring dan melatih calon-calon kader.

d. Pengatur konflik

Sebagai sarana pengatur konflik, potensi konflik selalu ada di setiap masyarakat. Negara Indonesia yang bersifat heterogen yang terdiri dari etnis, agama, budaya, dan lain-lain. Perbedaan tersebut dapat menyebabkan konflik. Maka partai politik melaksanakan fungsi sebagai pengatur konflik.

2. Strategi Partai dalam Pilkada

a. Ofensif (menyerang)

- Strategi perluasan pasar

Strategi perluasan pasar dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu *pertama*, kampanye pemilu. Dalam kampanye pemilu, strategi perluasan pasar yang ofensif bertujuan untuk membentuk kelompok pemilih baru disamping para pemilih yang telah ada. Strategi semacam ini perlu dipersiapkan melalui sebuah kampanye pengantar. untuk menjelaskan kepada publik

tentang penawaran mana saja yang lebih baik, dibandingkan dengan penawaran partai-partai lainnya.

Kedua, implementasi politik, dalam kasus ini produk baru yang ditawarkan yaitu politik baru atau lebih tepatnya keuntungan yang dihasilkan politik baru tersebut, perlu diiklankan. Sebelum pelaksanaan perlu dilakukan pekerjaan kehumasan yang cukup. Karena apabila hal ini tidak dilakukan, proyek tersebut sewaktu-waktu dapat didiskriminasikan. Produk atau politik yang sejak lama sudah ada dipasaran dan belum diimplementasikan secara sukses, atau bahkan gagal mengarah kepada perluasan pasar jika tetap menggunakan namanya yang lama. Produk atau politik semacam ini membutuhkan nama yang baru, deskripsi baru dari keuntungan ditawarkan, dan apabila diinginkan, juga sebuah kemasan baru yang dihubungkan dengan individu-individu baru.

Pertentangan internal perlu atasi, sedapat mungkin sebelum dilakukan kampanye terbuka atas produk atau politik tersebut.

- Strategi menembus pasar

Strategi menembus pasar bukan menyangkut ditariknya pemilih lawan atau warga yang selama ini

tidak aktif dengan memberikan penawaran yang lebih baik atau baru, melainkan penggalan potensi yang sudah ada secara lebih optimal, atau penggalan bagian yang dimiliki dalam kelompok target dimana keberhasilan telah diraih sebelumnya. Tujuan yang dimiliki misalnya adalah, diperolehnya hasil yang lebih baik dalam sebuah target (misalkan dahulu 30%, sekarang 50%). Hal ini menyangkut pemasaran program yang dimiliki secara lebih baik dan peningkatan intensitas keselarasan antara program dan individu, seperti halnya memperbesar tekanan terhadap kelompok-kelompok target.

b. Strategi defensif (bertahan)

- Strategi mempertahankan pasar

Strategi ini adalah strategi yang khas untuk mempertahankan mayoritas pemerintah. Dalam kasus ini partai akan memelihara pemilih tetap mereka dan memperkuat pemahaman para pemilih musiman sebelumnya terhadap situasi yang berlangsung. Terhadap partai oposisi yang menyerang, partai pemerintah akan berusaha mengaburkan perbedaan yang ada dan mereka menggunakan berbagai rincian strategi yang berbeda, seperti misalnya strategi yang

disebut sebagai strategi disinformasi. Partai yang ingin mempertahankan pasar, akan mengambil sikap yang bertentangan dari partai-partai yang menerapkan strategi ofensi. Apabila yang satu ingin menonjolkan perbedaan yang ada guna memberikan penawaran yang menarik, maka partai-partai yang menerapkan strategi defensif justru ingin ada perbedaan yang ada tidak dikenali.

- Strategi menyerahkan pasar

Strategi ini memiliki dua arti, yang dicontohkan oleh dua kasus ini.

1. Sebuah partai ingin menyerah dan dalam situasi tertentu ingin melebur dengan partai lain. Ini tidak terlalu sering terjadi. Yang lebih sering adalah kasus yang kedua.
2. Dalam pemilu yang menggunakan balot (Ballotage), ada tahap pemungutan suara kedua yang hanya diikuti oleh kandidat-kandidat terkuat dari pemilu tahap pertama, penyerahan pasar untuk sementara merupakan peristiwa yang sering terjadi. Sebagai contohnya, apabila dua minggu setelah pemungutan suara pertama diadakan pemungutan suara kedua, diaman pemungutan suara kedua hanya boleh diikuti dua kandidat yang memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara

pertama, maka para kandidat lainnya dihadapkan pada pertanyaan: strategi apa yang diterapkan dalam 14 hari tersebut ? dalam hal ini tidak ada pasar yang dipertahankan, sebagaimana pula tidak ada strategi ofensif yang dapat dipertahankan. Namun apa bila para kandidat terpaksa menterahkan pasarnya, mereka harus mempertegas ketidak ikut sertaannya dengan memberikan alasan yang mendasar dan mengusulkan pilihan lain. Dalam usulan ini terletak suatu tugas yang dapat di manfaatkan secara strategis. Tentu saja kondisi-kondisi suatu usulan pemilu dapat di perdebatkan dengan para kandidatlainnya. Hal ini dapat mencakup masalah persetujuan politik hingga pembagian kekuasaan, dan perlu di sertai dengan kampanye informasi bagi para multiplikator.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Deskriptif, adapun penelitian deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti dimana pemecahan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau melukiskan keadaan subjek/objek pada saat sekarang, berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana

2. Jenis Data

a. Data Primer

Data Primer adalah data dan informasi yang diperoleh melalui keterangan dari pihak-pihak yang berkompeten dan berpengaruh terhadap masalah yang ada data penelitian ini serta pihak-pihak terkait didalam penelitian ini. Adapun pihak-pihak yang berkompeten ini adalah pihak atau individu yang mempunyai tingkat pengaruh yang tinggi didalam DPC Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kabupaten Bantul.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai catatan, buku-buku, artikel-artikel ilmiah, koran, dan dokumen pendukung lainnya yang berhubungan dengan tema penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Dokumen yang digunakan bersumber pada arsip-arsip resmi yang berhubungan dengan Peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan itu sendiri. Dalam menguji keabsahan data, dapat digunakan tehnik triangulasi, yaitu tehnik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data yang ada untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Atau lebih jelasnya tehnik triangulasi yang paling banyak digunakan dalam pemeriksaan melalui sumber lain.

Pemeriksaan keabsahan data ini dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, dengan dokumen yang berkaitan.

b. Wawancara

Teknik wawancara (interview) adalah cara pengumpulan data melalui kontak langsung antara pengumpul data dengan sumber data yang dikenal dengan sebutan responden (Jalaludin Rahmat, 1989:110). Merupakan metode untuk memperoleh data dengan cara mewawancarai secara langsung para responden yang mempunyai kewenangan sehubungan dengan Peran Partai Politik dalam Pilkada di dalam Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.

4. Teknik Analisa Data

Dalam menganalisis data teknik yang digunakan adalah teknik kualitatif, yaitu menganalisa masalah tanpa menggunakan data statistik data matematis, dengan menggunakan analisa ini agar mendapat jawaban yang ilmiah, logis, dan empiris. Dalam penelitian ini penulis akan berusaha menginterpretasikan fenomena-fenomena yang ada, yang muncul dan yang terjadi dari data-data terkumpul tanpa penghitungan statistik (Noeng Muhadiir, 1989:71).

I. Sitematika Penulisan

Agar mendapatkan kemudahan dalam pembahasan, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terencana yaitu:

Bab I, Pendahuluan. Dalam bab ini terdiri dari: Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Dasar Teori, Definisi Konsepsional, Definisi Operasional, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

Bab II, Gambaran Objek Penelitian. Dalam bab ini akan di bahas tentang profil Kabupaten Bantul, dan Profil PDI Perjuangan.

Bab III, Pembahasan. Dalam bab ini akan dibahas tentang hasil penelitian, yaitu: (A) Strategi PDI Perjuangan Dalam Pilkada Serentak di Kabupaten Bantul 2015. (B) faktor-faktor Kekalahan PDI Perjuangan Dalam Pilkada serentak di Kabupaten Bantul 2015.

Bab IV, Penutup. Pada bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran